

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal atau yang sering disebut pengendalian intern (Sukrisno Agoes, 2012:100) mutlak diperlukan seiring dengan perkembangan transaksi bisnis perusahaan. Sistem pengendalian internal bagi suatu perusahaan adalah merupakan keharusan. Agar dapat mengawasi operasi organisasi, melindungi aset organisasi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi perusahaan.

Sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2016:129) adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Menurut I Gusti Agung Rai (2008:283) adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasaran”.

Menurut IAPI 2011, dalam Sukrisno Agoes (2012:100) mendefinisikan sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan kreditor dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian internal yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini.
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi
Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
Perusahaan publik, non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan”.

Definisi sistem pengendalian internal yang dikembangkan oleh COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) dalam Amin Widjaja Tunggal (2013:3). Definisi COSO tentang sistem pengendalian internal sebagai berikut: *Internal control is process, effected by entility's board of directors, management and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objective in the following categories:*

- *Effectiveness and efficiency of operations*
- *Reliability of financial reporting, and*
- *Compliance with applicable laws and regulations*

Penjelasan sistem pengendalian internal menurut COSO yaitu sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini:

- Efektivitas dan efisiensi operasi
- Keandalan pelaporan keuangan
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Berdasarkan pengertian sistem pengendalian internal diatas, dapat dipahami bahwa sistem pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian internal dari kegiatan manajemen pasar. Sistem pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun sistem pengendalian internal dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan sistem pengendalian internal meskipun dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Bahkan bagaimanapun baiknya sistem pengendalian internal yang idela dirancang, namun keberhasilan tergantung pada kompetensi dan kendala dari pada pelaksanaannya yang tidak terlepas dari berbagai keterbatasan.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Penggunaan sistem pengendalian internal adalah salah satu alasan untuk membantu tercapainya sebuah tujuan organisasi perusahaan. Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan.

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Azhar Susanto (2013:88) adalah sebagai berikut:

“Tujuan pengendalian internal yaitu untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan dicapai; untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan dan penggelapan; untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi”.

Adapun tujuan sistem pengendalian internal menurut Gondodiyoto (2007:258) adalah sebagai berikut:

“Tujuan sistem pengendalian internal adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah digariskan”.

Menurut Mulyadi (2016:130) tujuan sistem pengendalian internal adalah:

1. Menjaga aset organisasi
Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilingungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang

digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

3. Mendorong efisiensi
Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Untuk mencapai kegunaan dan tujuan sistem pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi, hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap aset perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur sistem pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

2.1.1.3 Komponen Sistem Pengendalian Internal

Menurut COSO dalam Amin Widjaja Tunggal (2013:6) komponen sistem pengendalian internal sebagai berikut:

Internal control consist of five integrated components:

1. *Control Environment*
2. *Risk Assesment*
3. *Control Activities*
4. *Information dan Communication*
5. *Monitoring Activities*

Komponen sistem pengendalian internal tersebut dapat dijelaskan menurut COSO sebagai berikut:

1. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)

The control environment is the set of standard, process, and structures that provide the basis for carrying out internal control across the organization. The board of directors and senior management establish the tone at the top regarding the importance of internal control and expected standards of conduct.

In the Control Environment's five principles in the 2013 Framework, which are:

- a. The organization demonstrate a commitment to integrity and ethical values.*
- b. The board of directors demonstrates independence from management and exercises oversight of the development and performance in internal control.*
- c. Management established, with board oversight, structures, reporting lines, and appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of objectives.*
- d. The organization demonstrates a commitment to attract, develop, and retain competent individuals in alignment with objectives.*

e. The organization holds individuals accountable for their internal control responsibilities in the pursuit of objectives.

Penjelasan Lingkungan Pengendalian menurut COSO yaitu bahwa lingkungan pengendalian internal didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Dewan direksi dan manajemen senior membangun nada di atas mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku.

Lima prinsip yang berkaitan dengan lingkungan pengendalian adalah:

- a. Organisasi menunjukkan komitmen untuk integritas dan nilai-nilai etika.
- b. Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja pengendalian internal.
- c. Manajemen menetapkan, dengan pengawasan dewan, struktur, garis pelaporan, dan pihak yang berwenang dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan.
- d. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan.

- e. Organisasi memegang individu yang bertanggung jawab untuk tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan.

2. *Risk Assesment* (Penilaian Risiko)

Risk Assesment involves a dynamic and iterative process for identifying and analyzing risks to achieving the entity's objectives, forming a basis for determining how risks should be managed. Management considers possible changes in the external environment and within its own business model that may impede its ability to achieve its objectives.

The four principles relating to Risk Assesment are:

- a. *The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable the identification and assesment of risks relating to objectives.*
- b. *The organization identifies risks to the achievement of its objectives across the entity and analyzes risks as a basis for determining how the risks should be managed.*
- c. *The organization considers the potential for fraud in assessing risks to the achievement of objectives.*
- d. *The organization identifies and assesment changes that could significantly impact the system of internal control.*

Penilaian Risiko menurut COSO menjelaskan bahwa penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko untuk mencapai tujuan entitas, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Manajemen menganggap kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal dan dalam model bisnis sendiri yang dapat menghambat kemampuannya untuk mencapai tujuannya.

Empat prinsip yang berkaitan dengan penilaian risiko adalah:

- a. Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.
- b. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
- c. Organisasi menganggap potensi penipuan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
- d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

3. *Control Activities (Aktivitas Pengendalian)*

Control activities are the actions established by the policies and procedures to help ensure that management directives to mitigate risks to the achievement of objectives are carried out. Control activities are performed at all levels of the entity, at various stages within business processes, and over the technology environment. They may be preventive or detective in nature and may encompass a range of manual and automated activities such as authorizations and approvals, verifications, reconciliations, and business performance reviews. Segregation of duties is typically built into the selection and development of control activities. Where segregation of duties is not practical, management selects and develops alternative control activities.

The three principles relating to Control Activities are:

- a. The organization selects and develops control activities that contribute to the mitigation of risks to the achievement of objectives to acceptable levels.*
- b. The organization selects and develops general control activities over technology to support the achievement of objectives.*
- c. The organization deploys control activities through policies that establish what is expected and in procedures that put policies into action.*

Aktivitas Pengendalian dijelaskan COSO yaitu tindakan yang ditetapkan oleh kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan di semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan lebih lingkungan teknologi. Mereka mungkin preventif atau detektif di dalam dan mencakup berbagai kegiatan manual dan otomatis seperti otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan ulasan kinerja bisnis. Pemisahan tugas biasanya dibangun ke pemilihan dan pengembangan kegiatan pengendalian. Dimana pemisahan tugas tidak praktis, manajemen memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian alternatif.

Tiga prinsip yang berkaitan dengan kegiatan aktivitas pengendalian:

- a. Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko terhadap pencapaian tujuan ke tingkat yang dapat diterima.
- b. Organisasi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan.
- c. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur yang menempatkan kebijakan ke dalam tindakan.

4. *Information and Communication (Komunikasi dan Informasi)*

Information is necessary for the entity to carry out internal control responsibility in support of achievement of its objectives. Communication occurs both internally and externally and provides the organization with the information needed to carry out day-to-day internal control activities. Communication enables personnel to understand internal control responsibilities and their importance to the achievement of the objectives.

The three principles relating to Information and Communication are:

- a. The organization obtains or generates and uses relevant, quality information to support the functioning of internal control.*
- b. The organization internally communicates information, including objectives and responsibilities for internal control, necessary to support the functioning of internal control.*
- c. The organization communicates with external parties about matters affecting the functioning of internal control.*

Komunikasi dan Informasi dijelaskan oleh COSO sebagai informasi yang diperlukan untuk entitas melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Komunikasi terjadi baik secara internal maupun eksternal dan menyediakan organisasi dengan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan

pengendalian internal sehari-hari. Komunikasi memungkinkan personil untuk memahami tanggung jawab pengendalian internal dan pentingnya mereka untuk pencapaian tujuan.

Tiga prinsip yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi adalah:

- a. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan melakukan kualitas informasi yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
- b. Organisasi internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggungjawan untuk pengendalian internal yang diperlukan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
- c. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal tentang hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

5. *Monitoring Activities* (Pengawasan)

Ongoing evaluations, separate avaluations, or some combination of the two are used to ascertain wheater each of the five components of internal control, including controls to effect the principles within each component, are present and functioning. Finding are evaluated and deficiencies are communicated in a timely manner, with serious matters reported to senior management and to the board.

The two principles relating to Monitoring Activities are:

- a. The organization selected, develops, and performs ongoing and/or separate evaluations to ascertain whether the components of internal control are present and functioning.*
- b. The organization evaluates and communicates internal control deficiencies in a timely manner to those parties responsible for taking corrective action, including senior management and the board of directors, as appropriate.*

Kegiatan Pengawasan yang dijelaskan COSO yaitu evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau beberapa kombinasi dari keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal, termasuk kontrol untuk efek prinsip-prinsip dalam setiap komponen, yang hadir dan berfungsi. Temuan dievaluasi dan kekurangan dikomunikasikan secara tepat waktu, dengan hal-hal yang serius dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan.

Dua prinsip yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan adalah:

- a. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan atau terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian internal yang hadir dan berfungsi.

- b. Organisasi mengevaluasi dan berkomunikasi kekurangan pengendalian internal pada waktu yang tepat untuk pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan dewan direksi yang sesuai.

Adapun komponen sistem pengendalian internal menurut Sukrisno Agoes (2012:100) adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orangn-orangnya. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal:
 - a. Integritas dan nilai etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
 - d. Falsafah manajemen dan gaya operasi
 - e. Struktur organisasi
 - f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
 - g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
2. Penaksiran Risiko
Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini:
 - a. Perubahan dalam lingkungan operasi
 - b. Personel baru
 - c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki
 - d. Teknologi baru
 - e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru
 - f. Restrukturisasi korporasi
 - g. Operasi luar negeri
 - h. Standar akuntansi baru
3. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian

yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

- a. *Review* terhadap kinerja
 - b. Pengolahan informasi
 - c. Pengendalian fisik
 - d. Pemisahan tugas
4. Informasi dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan.
5. Pemantauan
Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.

2.1.1.4 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal

Struktur sistem pengendalian internal setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan absolut kepada dewan komisaris dan manajemen untuk mencapai tujuan entitas.

Menurut Azhar Susanto (2013:110) ada beberapa keterbatasan dari pengendalian internal, sehingga sistem pengendalian internal dapat mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. Kesalahan (*Error*)
Yaitu kesalahan yang mencul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah satu perhatiannya selama bekerja terpecah.
- b. Kolusi (*Collusion*)
Kolusi terjadi ketika dua lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian (korupsi) ditempat mereka bekerja.
- c. Penyimpangan manajemen
Karena manajer suatu organisasi memiliki lebih banyak otorisasi dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah tidak efektif pada tingkat atas.
- d. Manfaat dan Biaya (*Cost and Benefit*)
Konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa biaya pengendalian internal tidak melebihi manfaat yang dihasilkannya. Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang menghasilkan manfaat yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengendalian tersebut.

Sukrisno Agoes (2012:106) mengatakan bahwa:

“Faktor yang membatasi pengendalian internal adalah biaya pengendalian internal yang tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian entitas tersebut. Meskipun hubungan manfaat-biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian internal, pengukuran secara tepat biaya, dan manfaat umumnya dilakukan. Oleh karena itu, manajemen estimasi kualitatif dan kuantitatif semua pertimbangan dalam menilai hubungan biaya-manfaat tersebut”.

Menurut COSO dalam Amin Widjaja Tunggal (2013:26) menjelaskan mengenai keterbatasan-ketebatasan sistem pengendalian internal sebagai berikut:

“The Framework recognizes the while intenal control provides reasonable assurances of achieving the entity’s objecties, limitations do exist. Internal control cannot prevent bad judgment or decisions, or external events that can cause an organization to fail to achieve its operational goals. In other words, even an effective system of internal control can experience a failure. Limitations may results from the:

1. *Suitability of objectives established as a precondition to internal control.*
2. *Reality that human judgment in decision making can be faulty and subject to bias.*
3. *Breakdowns that can occur because of human failures such as simple errors.*
4. *Ability of management to override internal control.*
5. *Ability of management, other personnel and/or third parties to circumvent control through collusion.*
6. *External events beyond the organization's control”.*

Berdasarkan uraian COSO, bahwa pengendalian internal tidak bisa mencegah penilaian buruk atau keputusan, atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan sebuah organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya. Dengan kata lain, bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengalami kegagalan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa keterbatasan-keterbatasan yang ada mungkin terjadi sebagai hasil dari penetapan tujuan-tujuan yang menjadi prasyarat untuk pengendalian internal tidak tepat, penilaian manusia dalam pengambilan keputusan yang dapat salah dan bias, faktor kesaahan/kegagalan manusia sebagai pelaksana, kemampuan manajemen untuk mengesampingkan pengendalian internal, kemampuan manajemen, personel lainnya, ataupun pihak ketiga untuk menghindari kolusi, dan juga peristiwa-peristiwa eksternal yang berada di luar kendali organisasi.

Faktor lain yang membatasi sistem pengendalian internal adalah biaya pengendalian internal entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat-biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesain pengendalian internal, pengukuran tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu,

manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya-manfaat tersebut.

2.1.2 Penerapan *Good Corporate Governance*

Kata *Governance* berasal dari bahasa Perancis *gubernance* yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *Corporate Governance*. Dalam bahasa Indonesia *Corporate Governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan.

Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *Good Corporate Governance*. Jadi pada dasarnya *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Di Indonesia, konsep *Corporate Governance* diperkenalkan secara resmi pada tahun 1999 ketika pemerintah membentuk Komite Nasional tentang *Corporate Governance*. Sebagaimana halnya di negara-negara lain di dunia, komite ini melahirkan kode *Corporate Governance*, yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Kode ini ditasbihkan sebagai referensi seluruh perusahaan Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka.

2.1.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Tricker (2003) dalam Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:35) adalah sebagai berikut:

“Tata kelola perusahaan merupakan istilah yang muncul dari interaksi diantara manajemen, pemegang saham, dan dewan direksi serta pihak terkait lainnya, akibat adanya ketidak konsistenan antara “apa” dan “apa yang seharusnya”, sehingga isu tata kelola perusahaan muncul”.

Menurut Adrian Sutedi (2011:1) *Corporate Governance* didefinisikan sebagai berikut:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang saham/Pemilik modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Adapun menurut *The Australian Stock Exchange (ASX)* dalam Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2008:3) *Corporate Governance* adalah:

“Corporate governance is the system by which companies are directed and managed. It influence how the objectives of the company set and achieved, how risk is monitored and assessed, and how performance is optimisted”.

Sesuai dengan kutipan diatas, *ASX* mengartikan *Corporate Governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran

usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran tersebut. *Corporate Governance* juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta dalam analisis dan pengendalian risiko bisnis yang dihadapi.

Pengertian lain menurut Marisi P. Purba (2012:23) *Good Corporate Governance* adalah:

“Suatu sistem dan seperangkat aturan yang berisi aturan terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dan hubungan antara manajemen dan *stakeholder* perusahaan. *Good corporate governance* juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan dan menurunkan biaya modal terkait dengan investasi”.

Berdasarkan definisi-definisi yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan intern dan ekstern perusahaan baik hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan memperhatikan kepentingan para *stakeholders*.

Good Corporate Governance berusaha menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam *Corporate Governance* adalah mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan semaksimal mungkin, sehingga tidak membebankan biaya yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas.

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Pendirian suatu organisasi sudah tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Apalagi menyangkut organisasi bisnis yang pastinya ada peluang untuk meraup keuntungan dari usahanya tersebut. Selanjutnya semua itu tertuang dalam visi dan misi perusahaan. Visi dan misi tersebut merupakan pertanyaan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatanusaha yang akan dilakukannya. Tentunya kegiatan terencana dan terprogram ini dapat tercapai dengan keberadaan sistem tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance*.

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:38) Prinsip dasar *Good Corporate Governance* terdiri atas:

1. Transparansi (*Transparancy*)

Prinsip dasar, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok perusahaan, (1) perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya, (2) informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki bentuan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan, (3) prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi, (4) kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman pokok pelaksanaan, (1) perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, (2) perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG, (3) perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian intern yang efektif dalam pengelolaan perusahaan, (4) perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*), (5) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman pokok pelaksanaan, (1) organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*), (2) perusahaan harus melakukan tanggung jawab social dengan antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan asa *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman pokok pelaksanaan, (1) masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif, (2) masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internan yang efektif.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Pedoman pokok pelaksanaan, (1) perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing, (2) perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, (3) perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.

Prinsip *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam Sedarmayanti (2012:57) adalah sebagai berikut:

a. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi dimaksud dengan perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk mengambil keputusan oleh *stakeholder* dan *shareholder*.

- b. Akuntabilitas (*Accountability*)
Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas dimaksud dengan perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
- c. Responsibilitas (*Responsibility*)
Responsibilitas yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kelangsungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen* atau warga perusahaan yang baik.
- d. Independensi (*Independency*)
Kemandirian yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip kemandirian dimaksud dengan perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak ada campur tangan dari pihak lain.
- e. Kewajaran (*Fairness*)
Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Kewajaran dimaksud dengan perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan”.

2.1.2.3 Unsur-Unsur *Good Corporate Governance*

Unsur-unsur *good corporate governance* berasal dari dalam perusahaan dan luar perusahaan, hal ini dinyatakan oleh Adrian Sutedi (2011), bahwa unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance* – Internal Perusahaan
Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, yaitu *Good Corporate Governance* – Internal Perusahaan. Unsur-unsur yang terkait sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham
 - b. Direksi
 - c. Dewan komisaris
 - d. Manajer
 - e. Karyawan
 - f. Sistem remunerasi berdasarkan kinerja
 - g. Komite audit
2. *Good Corporate Governance* – Eksternal Perusahaan
Unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan, yaitu *Good Corporate Governance* – Eksternal Perusahaan. Unsur-unsur yang terkait sebagai berikut:
 - a. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
 - b. Investor
 - c. Institut penyedia informasi
 - d. Akuntan public
 - e. Institut yang memihak kepentingan publik bukan golongan
 - f. Pemberian pinjaman
 - g. Lembaga yang mengesahkan legalitas

Unsur-unsur *Good Corporate Governance* tersebut harus ada dalam perusahaan yang akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, dalam pelaksanaannya maka harus dibentuk berbagai unsur yang ada di dalam perusahaan dan juga di luar perusahaan. Unsur-unsur yang ada dalam perusahaan merupakan sesuatu yang bisa mengontrol kinerja manajemen dalam melaksanakan kegiatannya, sedangkan unsur dari luar perusahaan merupakan alat acuan dan kontrol bagi manajemen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan.

2.1.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Good Corporate Governance*

Untuk menciptakan keberhasilan dalam penerapan *Good Corporate Governance*, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mas Achmad Daniri (2005:15). Konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia adalah sebagai berikut:

“Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan faktor internal”

Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Eskternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance*. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Terdapat sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya spremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Corporate* dan *Clean Government* menuju *Good Corporate Governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan *Good*

Corporate Governance yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).

- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi *Good Corporate Governance* secara sukarela.
- e. Hal lain tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi *Good Corporate Governance* terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di Lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi *Good Corporate Governance*.

2. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *Good Corporate Governance* yang berasal dari dalam perusahaan.

Beberapafaktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance*.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *Good Corporate Governance*.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.2.5 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldrigde (2008:7), menyatakan bahwa:

“Badan pengelola pasar modal di banyak negara menyatakan penerapan *corporate governance* diperusahaan-perusahaan publik secara sehat, telah berhasil mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor dan pihak lain yang berkepentingan secara tidak transparan. Mereka juga mengutarakan *Board of Directors* perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat melakukan bimbingan kepada manajemen perusahaan mereka secara lebih efektif. *Good corporate governance* juga dapat membantu *Board of*

Directors mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemiliknya”.

Adapun menurut Hon. Justice Owen dalam Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2008:8), menjelaskan sebagai berikut:

“Manfaat optimal *good corporate governance* tidak sama dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, bahkan pada perusahaan-perusahaan publik sekalipun. Karena perbedaan faktor-faktor internal perusahaan, termasuk riwayat hidup perusahaan, jenis usaha bisnis, jenis risiko bisnis, struktur permodalan dan manajemennya, manfaat yang dapat diperoleh secara optimal oleh satu perusahaan belum tentu dapat diperoleh secara penuh oleh perusahaan yang lain”.

Oleh karena itu guna mencapai manfaat secara optimal, seringkali diperlukan modifikasi penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain.

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* ini diharapkan adanya peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2008:7), menyatakan bahwa tujuan *good corporate governance* adalah:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan para anggota non-pemegang saham yang bersangkutan
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja dewan pengurus atau *board of directors* dan manajemen perusahaan
3. Meningkatkan mutu hubungan *board of directors* dengan manajemen senior perusahaan

4. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen
5. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya peraturan perundang-undangan.

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memenuhi kebutuhan para pengguna, laporan keuangan harus mengacu pada SAK.

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2012 No. 1 paragraf 10, menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Menurut M. Hanafi dan Abdul Halim (2012:63), mendefinisikan bahwa laporan keuangan adalah:

“Laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan”.

Menurut peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut Sofyan S. Harahap (2013:105), mendefinisikan bahwa:

“Laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu”.

Bedasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan akuntansi yang ringkas berupa data keuangan dan aktivitas dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta kinerja perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

2.1.3.2 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan sebuah perusahaan tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan perusahaan bisa berguna bagi pengguna dan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi.

Baik buruknya kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari sehat atau tidak sehatnya perusahaan tersebut. Perusahaan yang sehat akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas baik tanpa adanya penyimpangan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan.

Laporan keuangan memiliki kemampuan untuk menyajikan secara gamblang kesehatan keuangan suatu perusahaan guna memberikan keputusan bisnis yang informatif. Laporan keuangan sangat penting bagi manajemen perusahaan pada khususnya untuk pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan. Oleh karena itu, informasi akuntansi yang diperoleh harus memenuhi kriteria tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh FASB dalam Zaki Baridwan (2010:4), adalah sebagai berikut:

“Kriteria utama informasi akuntansi adalah harus berguna untuk pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi itu harus mempunyai dua sifat utama, yaitu relevan dan dapat dipercaya (*reliability*). Agar informasi itu relevan, ada tiga sifat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai nilai prediksi, mempunyai nilai umpan balik (*feedback value*), dan tepat waktu. Informasi yang dapat dipercaya mempunyai tiga sifat yaitu dapat diperiksa, netral, dan menyajikan yang seharusnya. Disamping dua sifat utama, relevan dan dapat dipercaya, informasi akuntansi juga mempunyai dua sifat sekunder dan interaktif yaitu dapat dibandingkan dan konsisten”.

Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang dimiliki laporan keuangan sebagaimana dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki empat persyaratan normatif, yakni:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Menurut Fanani dalam Sri Nurul Fajri (2013:4) kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan”.

Laporan keuangan perusahaan akan menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Apabila laporan keuangan perusahaan berkualitas baik maka dapat dikatakan para pelaku usaha berhasil dalam menjalankan kegiatan usahanya dan telah mampu meminimalkan risiko penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi.

Menurut Dwi Prastowo (2011:5), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, diantaranya:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas yang diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan

- kas (dan setara kas), dan untuk merumuskan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.
2. Menyediakan informasi perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat untuk menilai investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode pelaporan, dan juga untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta kebutuhan perusahaan untuk memanfaatkan arus kas tersebut.
 3. Memberikan informasi apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan”.

Adapun menurut Kasmir (2011:10) menjelaskan tujuan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Untuk memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Untuk memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Untuk memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu.
7. Untuk memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

2.1.3.4 Pihak-Pihak yang Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan

Laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji dari pekerjaan bagaian pembukuan tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan, dimana dengan hasil analisis terhadap laporan keuangan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Jadi untuk mengetahui

posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan perlu adanya laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Munawir (2010:2) adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Perusahaan

Pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaannya terutama untuk perusahaan-perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada orang lain seperti perseroan. Hal ini dikarenakan dengan laporan tersebut pemilik perusahaan akan dapat menilai sukses tidaknya manager dalam memimpin perusahaannya dan kesuksesan seorang manager biasanya dinilai atau diukur dengan laba yang diperoleh perusahaan.

2. Manager atau pimpinan perusahaan

Dengan mengetahui posisi keuangan perusahaannya, manager atau pimpinan perusahaan akan dapat menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem pengawasannya dan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaannya yang lebih tepat. Satu hal yang terpenting bagi manajemen adalah bahwa laporan keuangan tersebut merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kepada para pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Disamping itu laporan keuangan akan dapat digunakan oleh manajemen untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan.
- b. Untuk menentukan atau mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.
- c. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah diserahkan wewenang dan tanggung jawab.
- d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.

3. Investor

Investor atau penanam modal jangka panjang memerlukan laporan keuangan perusahaan tempat modal ditanamkan. Manfaatnya adalah untuk melihat prospek keuntungan di masa mendatang dan perkembangan perusahaan, mengetahui jaminan investasinya dan untuk mengetahui kondisi kerja atau kondisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut.

4. Kreditur dan Bankers

Sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan kredit dari suatu perusahaan, kreditur dan banker perlu mengetahui terlebih dahulu posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Posisi atau keadaan keuangan perusahaan peminta kredit akan dapat diketahui melalui penganalisaan laporan keuangan tersebut. Hal ini akan dilakukan baik oleh kreditur jangka pendek maupun kreditur jangka panjang. Kreditur jangka panjang di samping ingin mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dan beban-beban bunganya, juga untuk mengetahui apakah kredit yang akan diberikan cukup mendapat jaminan dari perusahaan tersebut, yang digambarkan atau terlihat pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

5. Buruh

Buruh yang biasanya diwakili oleh organisasinya akan berusaha untuk memperoleh tingkat upah yang layak dan terselenggaranya jaminan sosial yang lebih baik. Dengan melihat laporan keuangan dimana mereka bekerja, maka akan mengetahui kemampuan perusahaan untuk memberikan upah jaminan sosial yang lebih baik tersebut. Laporan keuangan akan lebih penting lagi bagi buruh terutama untuk perusahaan yang biasanya memberikan bonus atau premi tiap-tiap akhir periode. Hal ini dikarenakan dengan laporan keuangan tersebut dapat dinilai apakah pemberi bonus atau premi tersebut sudah cukup layak dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan pada periode tersebut.

6. Pemerintah

Pemerintah membutuhkan laporan keuangan sebuah perusahaan untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan”.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:120) pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan sebagai berikut:

1. Pemegang Saham

Laporan keuangan berguna bagi pemegang saham yaitu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, aset, hutang, modal, pendapatan, biaya dan laba. Dari informasi ini pemegang saham dapat mengambil keputusan apakah ia akan mempertahankan sahamnya, menjual atau menambahnya, semua tergantung pada kesimpulan yang diambilnya dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

2. **Investor**
Investor berkepentingan terhadap laporan keuangan yaitu untuk melihat kemungkinan potensi keuangan yang akan diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan, dana menentukan penanaman modalnya di perusahaan tersebut.
3. **Analisis Pasar Modal**
Analisis pasar modal berkepentingan terhadap laporan keuangan yaitu untuk mengetahui nilai perusahaan, kekuatan, dan posisi keuangan perusahaan. Informasi ini akan disampaikan kepada langganannya berupa investor baik individual maupun lembaga.
4. **Manajer**
Manajer berkepentingan terhadap laporan keuangan, yaitu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, menyusun rencana lebih baik, memperbaiki sistem pengawasan dan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih tepat, juga merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kepada pemilik perusahaan atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
5. **Karyawan dan Serikat Pekerja**
Karyawan dan serikat pekerja perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa, manfaat pension, dan kesempatan kerja.
6. **Instansi Pajak**
Bagi instansi pajak informasi laporan keuangan perusahaan diperlukan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.
7. **Pemberi Dana (Kreditur)**
Pemberi dana (kreditur) sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan untuk memberikan atau menolak permintaan kredit dari perusahaan tersebut.
8. **Supplier**
Kepentingan supplier terhadap laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan layak diberikan fasilitas kredit, seberapa lama akan diberikan dan sejauh mana potensi resiko yang dimiliki perusahaan.
9. **Pemerintah atau Lembaga Pengatur Resmi**
Pemerintah atau lembaga pengatur resmi sangat membutuhkan informasi dari laporan keuangan, karena ingin mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
10. **Langganan atau Lembaga Konsumen**
Langganan dalam era modern seperti sekarang ini khususnya di Negara maju benar-benar raja. Dengan konsep ekonomi pasar dan ekonomi persaingan, konsumen sangat diuntungkan dan berhak mendapatkan layanan yang memuaskan.

11. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) membutuhkan informasi dari laporan keuangan untuk menilai sejauh mana perusahaan merugikan pihak tertentu yang dilindungi.

12. Peneliti/Akademis/Lembaga Peringkat

Bagi peneliti informasi laporan keuangan akan digunakan sebagai data sekunder dalam melakukan penelitian terhadap topik tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan dan diolah untuk mengambil kesimpulan dari suatu penelitian yang dilakukan.

2.1.3.5 Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 11 tahun 2012, terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut:

- a. Aset tetap.
- b. Property investasi.
- c. Aset tak berwujud.
- d. Aset keuangan.
- e. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas.
- f. Persediaan.
- g. Piutang dagang dan piutang lainnya.
- h. Kas dan setara kas.
- i. Total aset diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk kelompok dalam lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan.
- j. Utang dagang dan terutang lain.
- k. Provisi.
- l. Liabilitas keuangan.
- m. Liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46: pajak penghasilan.
- n. Liabilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46.
- o. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58
- p. Kepentingan nonpengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

- q. Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemiliki entitas induk.
2. Laporan laba rugi komprehensif
Laporan laba rugi komprehensif minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut untuk periode:
- a. Pendapatan.
 - b. Biaya keuangan.
 - c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
 - d. Beban pajak.
 - e. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:
 - Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan.
 - Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dari pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok lepasan dalam rangka operasi yang dihentikan.
 - f. Laba rugi.
 - g. Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat.
 - h. Bagian pendapatan dari komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
 - i. Total laba rugi komprehensif.
3. Laporan perubahan ekuitas
Ekuitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:
- a. Total laba rugi komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali.
 - b. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrofektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25: kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan.
 - c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
 - Laba rugi.
 - Masing-masing pos pendapatan komprehensif lain.
 - Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

4. Laporan arus kas
Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.
5. Catatan atas laporan keuangan
 - a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu.
 - b. Mengungkapkan informasi yang diisyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan.
 - c. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.
6. Pengungkapan kebijakan akuntansi
Entitas mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan:
 - a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.
 - b. Kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

Adapun menurut PP No. 71 Tahun 2010 komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2.1.3.6 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Kualitas laporan keuangan menentukan apakah informasi yang terkandung didalamnya lebih berdaya guna bagi pemakai laporan keuangan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Abdul Hafiz Tanjung (2013:14) adalah sebagai berikut :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Berikut merupakan penjelasan karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Abdul Hafiz Tanjung yaitu:

1. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevan berarti juga harus berguna untuk peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) atas transaksi yang berkaitan satu sama lain. Berikut unsur-unsur yang informasi yang relevan:

- a. Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

- b. Memiliki Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam pengguna informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralisasi

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku. Bila pemakai akan membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan antarperiode, maka entitas perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

4. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai

tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2012, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu sebagai berikut:

1. Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.
2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegakkan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu.
3. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
4. Dapat dibandingkan
Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan

keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.1.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang di antaranya dikutip dari berbagai sumber dari peneliti sebelumnya. Penelitian yang relevansi dengan kualitas laporan keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
Hayyuning Tyas (2011)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan dan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan dan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan dan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Yesi Denti Utami (2009)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Sistem Pengendalian Internal dan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan <i>Good Corporate Governance</i> memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan
Abel Putra Setiawan (2015)	Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Penerapan Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 82,5%
Theresia Adelia (2012)	Peranan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kepercayaan Investor	<i>Good Corporate Governance</i> sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan dan Kepercayaan Investor sebagai variabel terikat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan dan kepercayaan investor

Farlencia Widjaja (2013)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Impelemtasi Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Pada Perusahaan Industri Keramik	Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel bebas dan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai variabel terikat	Hasi penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki implikasi manajerial atas implementasi prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> pada perusahaan industri keramik
Erlynda Y. Kasim (2015)	<i>Effect Of Implementation Of Good Corporate Governance And Internal Audit Pf The Quality Of Financial Reporting And Implications Of Return Of Shares</i>	<i>The paper examines two independent variables items, namely Good Corporate Governance and Internal Audit and its influence on the quality of financial reporting and its implications to Return Shares</i>	<i>Good implementation of adequate corporate governance in a company is one of the factors that Determine the quality of financial reporting. Similarly, the internal implementation of audit firm certainly factors Affect the quality of financial reporting. Quality financial reporting will certainly get a market response that can be seen from the level of the stock return.</i>

2.2 Kerangka Pemikiran

Kualitas laporan keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam kelangsungan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun eksternal dan juga dapat menggambarkan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen perusahaan, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem akuntansi yang dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi atau penyajian laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut dibutuhkannya sistem pengendalian internal dan penerapan *good corporate governance* pada perusahaan.

Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal mempunyai beberapa unsur dan sifat-sifat tertentu yang dapat meningkatkan kemungkinan dapat dipercayainya data-data akuntansi serta tindakan pengamanan terhadap aktiva dan catatan perusahaan. Tujuan dari sistem pengendalian internal menurut Gondodiyoto (2007:258) adalah: “menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. Sehingga dengan adanya tujuan sistem pengendalian internal bahwa dapat menjaga keandalan data akuntansi, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan

keuangan karena sistem pengendalian internal dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang benar (akurat).

Selain sistem pengendalian internal, penerapan *Good Corporate Governance* juga diperlukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tanpa adanya penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan dapat terjadi kecurangan-kecurangan karena lemahnya pengawasan. Secara definitif *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:35), yaitu transparansi (*Transparancy*), Akuntabilitas (*Accountability*), Resposibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Indepency*). Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan

Adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Lebih rinci lagi, kebijakan dan prosedur yang digunakan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang tepat serta menjamin ditaatinya atau dipatuhinya hukum dan peraturan, hal ini disebut pengendalian internal, atau dengan kata lain bahwa pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Mulyadi (2016:129) hubungan sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya”.

Maka dari itu dengan adanya sistem pengendalian internal dapat menjaga keandalan data akuntansi, serta dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi, sehingga akan menghasilkan laporan yang benar, melindungi atau membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan pengelapan-pengelapan, kegiatan organisasi dapat dilaksanakan dengan efisien.

Adapun penelitian yang terkait dengan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya dengan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap laporan keuangan. Hal itu karena dengan pengendalian internal dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi dan akan menghasilkan laporan yang benar dan membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan, (Hayyuning Tyas, 2011).

2.2.2 Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholder* menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan *disclosure* secara akurat, tepat waktu dan transparansi mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Menurut Adrian Sutedi (2012:2), hubungan penerapan *Good Corporate Governance* dengan kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan”.

Adapun penelitian yang terkait dengan penerapan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya dengan hasil bahwa implementasi *good corporate governance* yang baik atau tata kelola perusahaan yang memadai dalam perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas laporan keuangan, (Erlynda Y. Kasim, 2015).

2.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

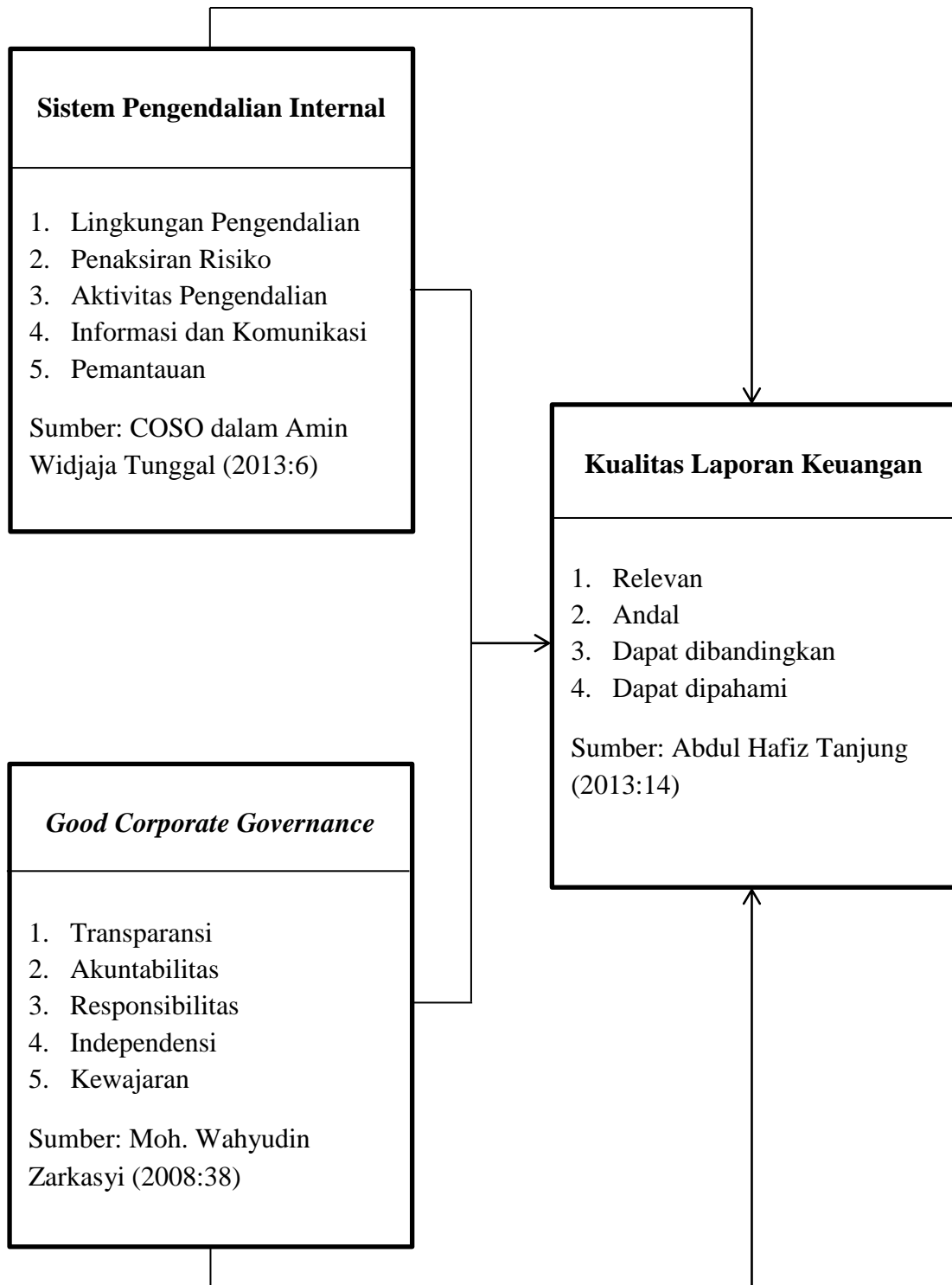
Sistem pengendalian internal atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan yang juga tidak terlepas dari adanya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* untuk menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut penelitian Farlencia Widjaja (2013) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*”, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal diperlukan perusahaan untuk memastikan agar prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terlaksana dengan baik, khususnya pada saat ini tengah berkembang *family business*. Kerapnya terjadi tumpang tindih peran dalam *family business* membutuhkan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* agar mampu bertahan di era globalisasi ini.

Menurut Robert Tampubolon (2005:49) menyatakan bahwa:

“Pengendalian internal merupakan salah satu unsur atau dasar untuk menciptakan *good corporate governance*, selain itu juga sebagai pengawasan aktif yang perlu dimasukkan dalam struktur organisasi dalam rangka memastikan adanya *check and balance* yang memadai, yaitu adanya sistem pengendalian yang kuat. Selain itu juga, *good corporate governance* merupakan sistem bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan”.

Dengan adanya sistem pengendalian internal pada perusahaan, mendorong dan membantu perusahaan untuk melaksanakan *good corporate governance* dalam kegiatan usahanya. Komponen-komponen sistem pengendalian internal pada perusahaan tidak akan berjalan efektif jika tidak menerepkan *good corporate governance*, sehingga sistem pengendalian intenal berkaitan dengan *good corporate governance* untuk dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran maka penulis akan mengemukakan hipotesis dari penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis 2: Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis 3: Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan